

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN MELALUI E-COMMERCE”



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum Pada
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :
IRMA SURIANI
NIM: 10500113005

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irma Suriani

Nim : 10500113005

Tempat/Tgl. Lahir : Bontote'ne, 01 Februari 1995

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat : Punggallu Desa Belabori Kec. Parangloe

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Melalui E-commerce

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 08 Juni 2017

Penyusun,

Irma Suriani

NIM : 10500113005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN MELALUI *E-COMMERCE* ”, yang disusun oleh Irma Suriani, NIM: 10500113005, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 M, bertepatan dengan 15 Ramadhan-Syawal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 15 Juni 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof.Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (.....)

Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H. (.....)



Munaqisy I : ~~St~~ Nurjannah, S.H., M.H. (.....)

Munaqisy II : Erlina, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Ahkam Jayadi, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II : Dr. Jumadi, S.H., M.H. (.....)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum,
UIN Alauddin Makassar


Prof.Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag
NIP.19621016 199003 1 003 

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah swt. Yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penipuan Melalui E-commerce (di Polrestabes Makassar)” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai *rahmatan li al-'alaimin* yang telah membawa umat manusia dari kesesatan kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar ilahi.

Saya sangat meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang saya miliki, tapi karena dukungan dan bimbingan serta doa dari orang-orang sekeliling saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya berikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, ayah handa Dahang Tabiang dan ibunda Manisi Dumbang yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang luar biasa besarnya kepada penyusun serta ketiga kakakku. Umar Dahang S.Pdi, Rudianto A.Ma, Sukarno S.Pdi. yang selalu memberikan dukungan yang terbaik.
2. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Istiqamah S.H.,M.H selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman

Syamsuddin S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.

5. Bapak Ahkam Jayadi.,SH.,MH. dan Bapak Dr. Jumadi.,SH.,MH. selaku pembimbing yang senantiasa membimbing ananda dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu St. Nurjannah SH.,M. Dan Ibu Erlina.,SH.,MH. Selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Polrestabes Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih untuk seluruh didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Kepada para sahabatku “Bestie”, Hardianti dan Nismawati yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.
10. Kepada sahabatku penghuni kelas Ilmu Hukum A, St. Muflihah, Amriani, Nurul Rahmah, Harisa tulkrima Dinda dan Ijah Ramadina terimakasih atas kebersamaan dan ketulusannya selama ini.
11. Keluarga besar Ilmu Hukum A Angkatan 2013, Saudara-saudara seperjuangan, Terima kasih untuk kalian semua, kalian saudara yang hebat dan luar biasa.
12. Keluarga KKN Angkatan 53 se-kecamatan Tinggimoncong yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.
13. Keluarga besar KKN Angkatan 53 Kelurahan Pattapang yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.

Untuk kesempurnaan skripsi ini, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Makassar, 1 Mei 2017

Penyusun,

Irma Suriani



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-10
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Garis Besar Isi.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11-50
A. Pidana dan Pemidanaan.....	11
B. Tindak Pidana Penipuan.....	28
C. Tinjauan Tentang E-commerce	32
D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	44

BAB III METODE PENELITIAN	51-53
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	51
B. Metode Pendekatan	51
C. Jenis dan Sumber Data	51
D. Metode Pengumpulan Data	52
E. Metode Pengolahan Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54-67
A. Keadaan Umum Visi dan Misi Polrestabes Makassar	54
B. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Berulangnya Penipuan Melalui E-commerce Serta Kendala yang Dihadapi Oleh Pihak Polrestabes Makassar Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui E-commerce	58
C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui E-commerce dan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui E-commerce	60
BAB V PENUTUP	68-69
A. Kesimpulan	68
B. Implikasi	69
DAFTAR PUSTAKA	70-71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72-88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	kadan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	esdan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrop terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberitanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	i	I
	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathahdanya	Ai	a dan i
	fathahdanwau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathahdanalifatauya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrahdanya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammahdanwau</i>	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tamar butah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).



ABSTRAK

Nama : Irma Suriani
Nim : 10500113005
Fak/Jur : Syari'ah & Hukum / Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Melalui E-commerce

Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Melalui E-commerce yang bertujuan 1) Untuk mengetahui apa saja sanksi pidananya terhadap pelaku penipuan melalui E-commerce atau perdagangan Elektronik via online (internet). 2) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam mencegah berulangnya penipuan melalui E-commerce.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan data berupa wawancara langsung/tanyajawab (dialog) dan dokumen. Sumber data penelitian dari data primer dan data sekunder. Pengolahan dan Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dikenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut. 2) upaya mencegah terjadinya kasus penipuan melalui e-commerce dengan menjalankan beberapa strategi seperti memberikan pelatihan kepada anggota kepolisian khusus dan juga edukasi kepada masyarakat tentang cyber crime. Dan tindakan pencegahan kepolisian seperti patroli dan pemeriksaan terhadap dunia usaha. Kemudian memberikan efek jera kepada pelaku penipuan.

Kata Kunci : Penipuan, E-commerce.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Walaupun Undang-Undang ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.¹

Terhadap pelanggaran pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp1 milyar, sesuai pengaturan pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak diseluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No .11 Tahun 2008 Tentang ITE.

masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.²

Kebutuhan dan penggunaan akan teknologi informasi yang diaplikasikan dengan internet dalam segala bidang seperti e-banking, ecommerce, e-government, e-education telah menjadi sesuatu yang lumrah dan telah membuat perilaku seseorang menjadi lebih baik dalam berperilaku dalam sebuah masyarakat. Informasi yang telah didapat menimbulkan suatu perubahan dalam seluruh bidang misalnya bidang sosial, ekonomi dan budaya secara cepat dan luas. Selain itu memberikan suatu peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia. Semakin canggihnya teknologi informasi yang berkembang saat ini, tidak menutup kemungkinan dampak negatif seperti pengancaman, pencurian, penipuan, pencemaran nama baik serta pengungkahan media yang tidak wajar (pornografi).

Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Permasalahan yang timbul dalam perubahan hukum itu adalah sejauh mana hukum bisa sesuai dengan perubahan tersebut dan bagaimana tatanan hukum itu agar tidak tertinggal dengan perubahan masyarakat. Disamping itu, sejauh mana

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2012), h.1.

masyarakat dapat mengikat diri dalam perkembangan hukum agar ada keserasian antara masyarakat dan hukum supaya melahirkan ketertiban dan ketenteraman yang diharapkan.

Era globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar dari pada kejahatan konvensional.³ Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Globalisasi yang disertai revolusi informasi mestinya dapat mempermudah pengembangan pemahaman bersama dan rasa persaudaraan dalam suatu relasi tanggung jawab universal untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang lebih baik, aman dan makmur. Akan tetapi pada kenyataannya perkembangan tersebut justru menghadirkan kompleksitas permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang muncul itu lebih beragam mencakup masalah ekologi, ekonomi, politik, dan sosial. Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet dan media elektronik lainnya. Selain memiliki dampak positif, teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki sisi negatifnya. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti perjudian online (internet), pembobolan Automated Teller Machine (ATM), pencurian data perusahaan lewat internet dan

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, h.11-12

penipuan melalui media elektronik. Oleh sebab itu diperlukan hukum untuk mengaturnya.

Menurut Achmad Sanusi.⁴

“Hukum adalah himpunan kaidah-kaidah, berisi keharusan ataupun larangan tentang pengaturan masyarakat, yang memang dianut dengan nyata oleh masyarakat. Atau, ia adalah rangkaian gejala-gejala masyarakat yang terjadinya memang diharuskan terhadap pelanggaran kaidah-kaidah itu, atau terhadap gejala-gejala masyarakat yang bertentangan dengan keharusan itu, dapat dikenakan sanksi, jika perlu dengan paksa oleh penguasa.

“Hukum sebagai alat pembaharuan sosial (a tool of social engineering) harus dapat digunakan untuk memberi jalan terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap perkembangan-perkembangan di bidang teknologi. Untuk itu pengaturan ahli teknologi sebagai tolak ukur kemajuan negara miskin dan berkembang harus dapat diatur dalam hukum tersendiri”.

Dahulu kala, perdagangan hanya bisa dilakukan dengan bertatap muka, penjual dan pembeli bertransaksi secara langsung. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, penjual dan pembeli pun bisa bertransaksi tanpa bertemu sekalipun. Banyak pengusaha yang memanfaatkan media elektronik dengan mempromosikan barang/jasanya secara online, karena lebih mudah dan tidak

⁴Abdul Kadir Pobela, “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik*”, Skripsi (Makassar: fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013)

memakan banyak biaya. Di Indonesia sudah banyak bermunculan toko-toko media elektronik termasuk di kota Makassar. Mulai dari perusahaan besar sampai penjual rumahan sudah memanfaatkan media elektronik ini untuk mempromosikan dagangannya. Media-media elektronik itu berupa internet, televisi, radio, dan lain-lain. Kejelasan toko-toko di media elektronik patut dipertanyakan baik dari segi kualitas maupun keabsahan toko-toko tersebut, sebab peluang dalam melakukan tindak kejahatan berupa penipuan sangat mungkin terjadi di kota Makassar, banyak orang yang mengalami kasus penipuan melalui media elektronik ini mengingat masyarakat banyak yang telah memiliki akun sosial berupa facebook atau twitter mempermudah pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya.

Contoh riilnya adalah kasus yang terjadi di Kota Makassar, pelaku kejahatan memiliki situs atau website yang menjual barang-barang elektronik berupa handphone, kamera digital, ipod serta laptop. Korban yang melihat foto yang ada di situs atau website tersebut tertarik untuk melakukan transaksi jual beli dan berselang beberapa waktu korban telah mentransfer uang kepada si pelaku. Akan tetapi hingga pembayarannya telah lunas korban tidak kunjung mendapatkan barang yang telah dibayarnya tersebut. Kasus ini membuat Penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimana sanksi pidana dan upaya pencegahannya terhadap penipuan melalui perdagangan elektronik. Dengan melalui judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan melalui E-commerce.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengurangi dan mencegah berulangnya penipuan melalui e-commerce di Polrestaes Makassar?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan yang dilakukan melalui e-commerce di Kota Makassar?

C. Pengertian Judul

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN MELALUI E-COMMERCE”. Untuk memberikan arah yang tepat terhadap masalah yang dibahas, penulis berusaha memberikan pengertian kata-kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).⁵
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum; bantuan-bantuan hukum.⁶

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 120

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1174.

3. Menipu adalah mengenakan tipu muslihat; mengakali; memperdayakan. penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).⁷
4. Perdagangan elektronik (*e-commerce*) adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer.⁸

D. Kajian Pustaka

Berbagai sumber kepustakaan yang penulis telusuri, belum ditemukan kajian yang serupa dengan penelitian penulis, baik dari segi judul dan masalah yang dibahas. Namun terdapat beberapa rujukan yang memiliki kaitan penelitian penulis berupa hasil penelitian lapangan (*field research*) seperti skripsi dan kajian pustaka (*library research*) berupa buku-buku yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam menuangkan ide-ide dan gagasan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian lapangan berupa skripsi, seperti yang ditulis Berechmans Marianus Ambardi Bapa yang berjudul penanggulangan tindak pidana penipuan dalam pembelian secara online shop, tahun 2013. Yang menerangkan tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Dalam skripsinya itu diteliti juga tentang penanggulangan tindak pidana penipuan.⁹

⁷ Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1199

⁸ Dewi Irmawati, "Pemanfaatan E-commerce Dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Ilmiah* (Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya, 2011)

⁹ Berechmans Marianus Ambardi, "*Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembelian Secara Online Shop*" *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013)

Selain penelitian lapangan berupa skripsi yang telah dikemukakan, ditemukan banyak kajian pustaka merekomendasikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan melalui e-commerce di Polrestabes Makassar. Kajian pustaka yang dimaksud antara lain adalah buku-buku literatur seperti:

Pertama, buku yang berjudul *Merajut Hukum di Indonesia*, tahun 2014, ditulis Rahman Syamsuddin, dan Ismail Aris, yang dalam salah satu bab pembahasannya menguraikan tentang definisi Tindak Pidana.

Kedua, buku yang berjudul *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, tahun 2008, ditulis Soemarno Partodihardjo, dalam buku ini disebutkan beberapa kejahatan dalam perdagangan secara Elektronik dan meliputi ciri-cirinya.

Ketiga, buku yang berjudul *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, ditulis Budi Suhariyanto, dalam buku ini dijelaskan tinjauan umum mengenai cybercrime dan juga dijelaskan urgensi Undang-Undang cybercrime dalam sistem hukum nasional serta pengaturan tindak pidana teknologi informasi (cybercrime) dalam UU ITE.

Keempat, buku yang berjudul *cepat dan mudah memahami hukum pidana*, ditulis Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, dalam buku ini membahas masalah-masalah tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok dan menjelaskan unsur objektif dan unsur subjektif tindak pidana penipuan.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa saja sanksi pidananya terhadap pelaku penipuan melalui e-commerce.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam mencegah dan mengurangi berulangnya penipuan melalui media elektronik dan kendala yang dihadapi oleh pihak polrestabes Makassar dalam menangani kasus tindak pidana penipuan melalui e-commerce.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan akan menghasilkan kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya jurusan hukum pidana.
 - 2) Untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang pengguna aplikasi sosial media

b. Kegunaan praktis

Dapat menambah wawasan, dan mengetahui upaya pencegahan terhadap penipuan e-commerce di Kota Makassar.

F. *Garis Besar Isi*

Skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara umum berupa garis besar isi skripsi sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis-garis besar isi.

Bab kedua Tinjauan Pustaka membahas mengenai pengertian dasar dan berbagai materi dan substansi terkait dengan permasalahan yang berasal dari literature.

Bab ketiga metodologi penelitian, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

Bab keempat hasil penelitian, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan yang dilakukan melalui e-commerce serta upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian terhadap penipuan melalui e-commerce.

Bab kelima penutup merupakan rangkaian isi tulisan yang akan di uraikan dalam kesimpulan hasil penelitian dan implikasi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Pidana dan Pemidanaan*

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.¹ Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.²

Adapun pengertian pemidanaan itu sendiri mendapat penjelasan oleh Sudarto yakni Perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa: penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumannya (*berechten*).

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman disini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.

¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.119

² Rahman Syamsuddin & Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 191

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto yang menyebutkan bahwa:

“PENGHUKUMAN berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata. Kemudian istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.³

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

³Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 6

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h. 54.

Menurut Rahman Syamsuddin dalam bukunya *Merajut Hukum Di Indonesia* mengatakan bahwa:⁵

“Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana”.

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementrian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Contoh: U.U no. 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum (pasal 127, 129 dan lain-lain).⁶

Hukum pidana belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari Bahasa latin *Delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh Karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.⁷

⁵ Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, h. 192

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 55.

⁷ Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, h. 192

Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Adami Chazawi menyatakan bahwa:

“Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat”.⁸

Sedangkan Rahman Syamsuddin & Ismail Aris menyimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi, baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan daerah.⁹

Menurut Mahrus Ali dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana mengatakan bahwa:

“Perbuatan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. Menurutnya kesalahan tidak terkait dengan perbuatan pidana, tapi berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Ketika seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, tidak secara otomatis orang itu dijatuhi pidana. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang itu, harus terdapat kesalahan pada orang itu dan telah dibuktikan dalam proses peradilan, dan itu di luar perbincangan tentang perbuatan pidana. Dalam praktik peradilan yang pertama kali dilakukan hakim ketika memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Setelah hal itu terbukti, hakim kemudian membuktikan ada tidaknya kesalahan pada diri orang itu”.¹⁰

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

⁹ Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, h. 193

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 98-100

karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).¹¹ Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri.

Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.¹²

Selain itu, sifat melawan hukum dilihat dari sumber perlawanannya terbagi menjadi dua. Pertama, unsur melawan hukum yang objektif yaitu menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.¹³ Hal ini digambarkan pada pasal 164 ayat 1 KUHP (1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan me-lawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Hal yang menjadi tuntutan atau larangan disitu ialah keadaan ekstern dari si pelaku. Yaitu tidak dizinkan atau dalam istilah di atas “dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”. Maka ia melanggar atau melawan hukum yang objektif. Kedua, unsur melawan hukum yang subjektif yaitu yang kesalahan atau peanggarannya terletak dihati terdakwa sendiri. Seperti rumusan

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 64.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 69.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 68.

pencurian yang mencantumkan maksud pengambilan untuk memiliki barang secara melawan hukum.

Menurut Mahrus Ali ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. *Pertama*, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil. *Ketiga*, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedaan, dan keadaan yang memberatkan pembedaan.¹⁴

Lebih jelasnya Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik atau perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terdapat unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:¹⁵

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan *An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or*

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, h. 100

¹⁵ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, h. 194-195

actus non facit reum nisi mens sit rea (tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga yakni:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- c. Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*)

Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni:

- a. Tak berhati-hati;
- b. Dapat menduga akibat itu.

2) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa:
 - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
 - 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum atau sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.

Menurut Satochid Kartanegara unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan (*omstandigheid*). Selanjutnya Satichid menyatakan kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yakni kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*) dan kesalahan (*schuld*).¹⁶

Menurut Lamintang unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *woorbedachteraad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum atau *wederechtelijk*;

¹⁶ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, h. 195

2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Rahman Syamsuddin & Ismail Aris menyimpulkan bahwa seluruh unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur tidak terbukti dan unsur yang paling urgen untuk perbuatan pidana (ditilik dari sudut objektif) menurut Apeldoorn adalah sifat melawan hukumnya. Jika tidak terbukti maka tak ada perbuatan pidana sehingga menyebabkan terdakwa harus dibebaskan. Selanjutnya menurut Rahman Syamsuddin pendapat dari Satochid dan Lamintang tentang unsur-unsur delik di atas, maka pendapat Satochid yang memasukkan *toerekeningsvatbaarheid* sebagai unsur subjektif kurang tepat. Hal ini karena tidak semua *toerekeningsvatbaarheid* bersumber dari diri pelaku, namun antara lain dapat bersumber dari *overmacht* dan *ambttelijkbevel* (pelaksana perintah jabatan). Sedang pendapat Lamintang, yang menjelaskan bahwa unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku adalah tepat, tetapi apa yang tersebut pada butir 2, 3, dan 4 unsur subjektif, pada hakikatnya menurut Rahman Syamsuddin termasuk “kesengajaan” pula.¹⁷

4. Jenis-Jenis Delik (Tindak Pidana)

Penggolongan jenis-jenis delik terdapat di dalam KUHP dan di luar KUHP. Jenis-jenis delik dalam KUHP terdiri atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran

¹⁷ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, h. 196-197

(*overtredingen*), atau disebut delik hukum (*rechtsdelicten*) dan delik undang-undang (*wetdelicten*).

Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan) apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas dari apakah asas-asas hukum tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana. *Rechtdelictum* adalah perbuatan dalam keinsyafan batin manusia yang dirasakan sebagai perbuatan tidak adil menurut undang-undang dan perbuatan tidak adil menurut asas-asas hukum yang tidak dicantumkan secara tegas dalam undang-undang pidana. Tegasnya, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi masyarakat memandangnya sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum masyarakat yang bersangkutan, maka di situ merupakan *rechtdelicten* sebagai suatu kejahatan.

Westdelicten adalah perbuatan yang menurut keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana. Jadi, delik undang-undang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum rakyat.

Perbuatan pidana dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 160 KUHP tentang

penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan.¹⁸

Selain delik formil dan delik materiil yang seperti disebutkan sebelumnya, di dalam KUHP itu, masih dikenal pembagian delik menurut rumusan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, yaitu:¹⁹

1) *Doleuse Delicten* dan *Culpose Delicten*

Doleuse delicten ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. *Culpose delicten* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan.

2) *Formeele Delicten* dan *Materiile Delicten*

Formeele delicten ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang. Adapun *materiile delicten* adalah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan undang-undang.

3) *Commisie Delicten* dan *Ommisie Delicten*

Commisie delicten atau *delicta commisionis* ialah delik yang terjadi karena suatu perbuatan seseorang yang melanggar larangan untuk melakukan sesuatu.

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, h. 102

¹⁹ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, h. 197-200

Ommisie delicten atau *delicta ommisionis* ialah delik yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu atau melanggar apa yang menjadi sebuah perintah.

4) *Zelfstandige Delicten* dan *Voortgezette Delicten*

Zelfstandige delicten ialah delik yang berdiri sendiri yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. *Voortgezette delicten* ialah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut.

5) *Alfopende Delicten* dan *Voortdurende Delicten*

Alfopende delicten ialah delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan. *Voortdurende Delicten* ialah delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.

6) *Enkelvoudige Delicten* dan *Samengestelde Delicten*

Enkelvoudige delicten mempunyai arti yang dubieus (kesamaan) dengan *alfopende delicten*, yaitu delik yang selesai dengan satu kelakuan. *Samengestelde delicten* ialah delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan.

7) *Eenvoudige Delicten* dan *Gequalificeerde Delicten*

Eenvoudige delicten ialah delik biasa atau juga disebut *geprivilegieerde delicten* yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok dan disertai unsur yang meringankan sedangkan *gequalificeerde delicten* ialah delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang memberatkan.

8) *Polietieke Delicten* dan *Commune Delicten*

Polietieke delicten ialah delik yang dilakukan karena adanya unsur politik, antara lain:

- a. *Gemengde politieke delicten* yang merupakan pencurian terhadap dokumen negara.

- b. *Zuivere politieke delicten* yang merupakan kejahatan pengkhianatan intern dan pengkhianatan ekstern.
- c. *Connexe politieke delicten* yang merupakan kejahatan menyembunyikan senjata.

Commune delicten ialah delik yang ditujukan pada kejahatan yang tidak termasuk keamanan negara.

9) *Delicta Propria* dan *Commune Delicten*

Delicta propia adalah delik yang hanya dilakukan oleh orang tertentu karena suatu kualitas, sedangkan *commune delicten* ialah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya.

10) Pengelompokan *Delict* Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Misalnya, delik aduan, delik harta kekayaan, dan lainnya. Delik aduan ialah suatu delik yang hanya boleh dituntut jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik. Delik putuatif ialah suatu perbuatan (tetapi belum termasuk perbuatan pidana) yang disangka delik. Akibatnya, orang yang bersangkutan tidak dapat dipidana sebab ia memang tidak melakukan delik. Jadi, delik putuatif dapat disebut delik sangkaan.

5. Teori Pidanaan

Menurut pasal 10 *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana jo Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah republik Indonesia dan mengubah undang-undang hukum pidana dianggap sebagai kitab undang-undang hukum pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP), macam-macam pidana adalah sebagai berikut:²⁰

²⁰ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, h. 243-244

Pasal 10

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 - 1) Pidana mati,
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Kurungan,
 - 4) Denda.
- b. Pidana tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu,
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu,
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Adapun lembaga yang melaksanakan pidana dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana Mati: Regu Tembak;
 - b. Pidana Penjara: Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
 - c. Pidana Kurungan: Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
 - d. Pidana Tutupan: Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
 - e. Pidana Denda: Jaksa;
2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu: lembaganya bergantung pada jenis dari hak yang dicabut tersebut;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu: Jaksa;
 - c. Pengumuman putusan hakim (pengadilan): Panitera Pengadilan Negeri

Terdapat beberapa teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana, sebagai berikut:

1) Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukansuatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada ada atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²¹

Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk “memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*)

²¹Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 59

sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan ini menurut Emanuel Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan dan pidana sebagai “*Katagorische Imperatief*” yaitu seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.²²

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law* sebagai berikut:

“.... Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.²³

Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*). Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal, yaitu Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Teori Hegel ini dikenal dengan “*quasi-mathematic*”, yaitu:

1. *Wrong being (crime) is the negation of right and*
2. *Punishment is the negation of the negation*

²²Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, h. 244-245

²³ Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. h. 60

Menurut Nigel Walker penganut teori retributif dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- a) Penganut teori retributif yang murni (*The Pure Retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b) Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:
 - i. Penganut teori retributif yang terbatas (*The Limiting Retributivist*) yang berpendapat bahwa Pidana tidak cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - ii. Penganut teori retributif yang distributif (*Retribution in Distribution*), disingkat dengan sebutan “*distributive*” yang berpendapat bahwa Pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.²⁴

2) Teori Relatif

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Tetapi pemidanaan hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dengan demikian dalam teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan

²⁴ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, h. 245

suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat oleh karena itu, teori ini pun sering disebut teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Karakteristik atau ciri-ciri pokok antara teori retributif dan teori utilitarian dikemukakan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

1) Teori Retributif:

- a. tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. didalamnya tidak mengandung tujuan lain;
- c. kesalahan satu-satunya syarat adanya pidana;
- d. pidana harus sesuai dengan kesalahan;
- e. pidana melihat kebelakang, yaitu sebagai pencelaan yang murni, tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar;

2) Teori Utilitarian:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. pencegahan sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya karena sengaja atau culpa yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana;
- d. pidana ditetapkan dengan tujuan sebagai sarana untuk pencegahan kejahatan;
- e. pidana melihat kedepan (prospektif), pencelaan ataupun pembalasan semata tidak dapat diterima bila tidak membantu pencegahan untuk kesejahteraan masyarakat.

3) Teori gabungan

Teori ini diajukan pertama kali oleh Pellegrino Rossi (1787-1884). Teori ini menjabarkan bahwa tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun, teori

ini berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.²⁵

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata “*tipu*” yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.²⁶

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.²⁷ Dalam islam pun tindak pidana penipuan adalah perbuatan yang dilarang seperti firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 30 menyatakan bahwa:

وَالَّذِي يَمْكُرُ بِكَ الْآيِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ
اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ

Terjemahnya:

²⁵Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. h. 61-62

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 52.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, h.52.

“ Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa penipuan adalah salah satu perbuatan buruk, sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah. bahkan dalam islam pun penipuan adalah suatu perbuatan buruk yang tidak bisa ditoleransi. Di Indonesia menganut hukum positif dan hukum islam, mengkategorikan penipuan sebagai salah satu tindak pidana yang di atur dalam Undang-Undang disertai dengan sanksinya.

Penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan *bedrog*, yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Dalam tindak pidana penipuan ini, terdapat unsur *objektif* dan *subjektif*. Unsur *objektif*, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak: memakai nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat; agar seseorang itu:

- a. Menyerahkan sesuatu barang;
- b. Membuat utang;
- c. Menghapuskan piutang.

Sedangkan unsur *subjektif* dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, akan tetapi tentang keharusan adanya suatu maksud (*bijkomen oogmerk*) dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana dalam bentuk pokok

diatur dalam pasal 378 KUHP itu merupakan *opzettlijk misdrijf* atau merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja²⁸. (P.A.F. Lamintang, 1989:141)

Didalam KUHP tepatnya pada pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.

Dalam pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut :

*“Barang siapa dengan maksud hendak dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.*²⁹

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan pasal 378 KUHP diatas, maka R. Sugandhi (1980 : 396-397) sebagaimana dikutip oleh Wirjono mengemukakan pengertian penipuan bahwa :

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.³⁰

²⁸ Ismu Gunadi/Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grou, 2014),h. 144-145

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, h.52.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, h.52.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya perbuatan pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.³¹

Jadi ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud. Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu. Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan memberikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.³²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam buku II bab XXV pasal 378-395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu:

- a. Pasal 278 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok;

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, h. 56.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, h.56.

- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan;
- c. Pasal 379 (a) KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut *penareiken* botol (*flessentrekkerij*) yang mengatrrur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *flessentrekkerij* adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
- d. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang.
- e. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli, dan sebagainya.

C. Tinjauan Tentang E-commerce

1. Pengertian E-commerce

E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.³³ *E-commerce* juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media online. Didalam pengertian lain, *e-commerce* yakni transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan

³³ Andreas Viklund, *E-commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman menggunakan E-commerce*, 2009, <http://jurnal-sdm.blogspot.com>, (diakses 6 juni 2017)

pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan dan peralihan hak.³⁴

Dari berbagai definisi, terdapat kesamaan. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa e-commerce memiliki karakteristik sebagai berikut:³⁵

- a) Terjadi transaksi antara dua belah pihak;
- b) Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi.
- c) Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

2. Ruang Lingkup *E-commerce*

Kegiatan *E-commerce* mencakup banyak hal, untuk membedakannya *E-commerce* dibedakan menjadi 3 berdasarkan karakteristiknya.³⁶

a. *Business to Business*, karakteristiknya:

1. Trading partner yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.
2. Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati.
3. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk mengirimkan data.

³⁴ Aspek-aspek Hukum Tentang Pemalsuan Tanda Tangan Digital Dalam E-commerce, <http://elib.unikom.ac.id>, (diakses 6 Juni 2017)

³⁵ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis e-commerce perspektif islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h.17

³⁶ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis e-commerce perspektif islam*, h. 18

4. Model yang umumnya digunakan adalah *peer to peer* dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan dikedua pelaku bisnis.
- b. *Business to Consumer*, karakteristiknya:
1. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarakan secara umum.
 2. Service yang dilakukan juga bersifat umum, sehingga mekanismenya juga dapat digunakan oleh orang banyak.
 3. Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan.
 4. Sering dilakukan system pendekatan *client server*.
- c. *Consumer to consumer*, merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula.

3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual-beli melalui *e-commerce*

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan atau pun penipuan.
2. cakap untuk membuat suatu perjanjian artinya kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan cukup usia oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerdata,

mereka yang telah cukup berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah cukup usia, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris juga mengatur tentang kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yakni paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun, hal ini terdapat dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Batas umur seseorang untuk bisa cakap melakukan perbuatan hukum tidak hanya diatur didalam KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengaturnya, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yakni Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi sudah jelas bahwa anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih bisa dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Mengenai suatu hal tertentu artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas objeknya sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

4. Suatu sebab yang dibolehkan artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang sah yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.³⁷ Akibat jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dapat menyebabkan perjanjian itu dapat dibatalkan. Sebaliknya, apabila perjanjian itu disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Suatu perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur *essentialia* yaitu unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, karena itu merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat adanya atau sahnya perjanjian ialah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, obyek tertentu dan kuasa atau dasar yang sah.
- b. Unsur *naturalia* unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Cet. Ke 12; Jakarta: PT.Intermasa, 1987), h.17

perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.

- c. Unsur *accidentalita* yaitu unsur yang harus dimuat atau harus disebut secara tegas dalam perjanjian.

Batalnya suatu perjanjian yaitu suatu perjanjian yang dibuat dengan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni Pasal 1320 KUHPdata, hal ini bisa berakibat kepada batalnya perjanjian. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat cacat kehendak, yaitu:

- a. Paksaan adalah terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya salah satu pihak karena diancam dan ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian.
- b. Kekhilafan atau kekeliruan adalah apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Misalnya khilaf mengenai barang, seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian hanya turunan saja. Khilaf mengenai orang, seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan hanya nama-namanya saja yang kebetulan sama.
- c. Penipuan adalah apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya.

Misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya, dipalsukan nomor mesinnya.

Dengan demikian, maka ketidak cakapan seseorang dan ketidak bebasan dalam memberikan kesepakatan pada suatu perjanjian, memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan sepakatannya itu untuk meminta pembatalan perjanjiannya.³⁸

Pelaku usaha dalam perjanjian jual beli melalui transaksi *e-commerce*, dapat melakukan wanprestasi kepada para konsumen. Wanprestasi bisa diartikan sebagai ingkar janji atau tidak memenuhi sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya. Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu:³⁹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika pelaku usaha tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya saja

³⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h.24

³⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h.45

dalam hal pengiriman barang yang mengalami keterlambatan waktu sampai ketangan konsumen.

Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai penipuan.

E-commerce merupakan kegiatan jual beli yang perbedaannya dilakukan melalui media *online*. Hanya saja dalam jual beli melalui *e-commerce* dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual beli tersebut.⁴⁰

Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya:

- a. Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2)
- b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan Informasi dan/atau Transaksi Elektronik (Pasal 8)
- c. Menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab (Pasal 15)

Dalam perjanjian *e-commerce*, terdapat proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang diberi maka transaksi antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual. Setelah penjual menerima konfirmasi

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bab IV, pasal 15

bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

4. Tujuan *E-commerce*

Dengan menggunakan *e-commerce* maka perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

5. Kejahatan dalam Perdagangan Secara Elektronik (*e-commerce*)⁴¹

a. Penipuan online

Ciri-cirinya adalah harga produk yang banyak diminati sangat rendah, penjual tidak menyediakan nomor telfon, tidak ada respons terhadap pertanyaan melalui e-mail, menjanjikan produk yang sedang tidak tersedia. Risiko terburuk adalah pemenang lelang yang telah mengirimkan cek atau uang atau membayar via credit card tidak memperoleh produk, atau memperoleh produk yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau diiklankan.

b. Penipuan pemasaran berbelanja online

Ciri-cirinya adalah mencari keuntungan dari merekrut anggota dan menjual produk secara fiktif. Risikonya adalah ternyata sebanyak 98% investor gagal atau rugi.

c. Penipuan kartu kredit

Cirinya adalah terjadi biaya misterius pada tagihan kartu kredit untuk produk/layanan internet yang tidak pernah dipesan oleh pemilik kartu kredit. Risikonya adalah korban bisa perlu waktu lama untuk melunasinya. Indonesia menempati urutan tertinggi dalam penyalahgunaan kartu kredit.

6. Bentuk-Bentuk Kejahatan Cyber Crime antara lain:

a. Unauthorized acces to computer system and service

⁴¹ Soemarno Partodihardjo, *Tanya jawab Sekitar Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008),h.147-149

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup kedalam suatu system jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

b. Illegal contents

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. Data Forgery

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.

d. Cyber Espionage

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran.

e. Cyber Sabotage and Extortion

Keahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. Offense Against Intellectual property

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet.

g. Infregments of Privacy

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap

keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui orang lain akan dapat merugikan korbannya secara materil maupun immateriil seperti nomor kartu kredit, nomor pin ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Berdasarkan kriteria bentuk-bentuk kejahatan *cyber* di atas, maka dapat di klasifikasikan lebih sederhana, bentuk-bentuk aktifitas kejahatan komputer dapat dikelompokkan dalam dua golongan (*besar-pen*) : penipuan data dan penipuan program.⁴²

Kejahatan (*Cybercrime*) internet yang marak di Indonesia meliputi penipuan kartu kredit, penipuan perbankan, defacing, cracking, transaksi seks, judi online dan terorisme dengan korban berasal dari luar negeri seperti AS, Inggris, Australia, Jerman, Korea, serta Singapura, juga beberapa daerah di tanah air. Menurut RM Roy Suryo (2001).⁴³

Contoh kasus penipuan melalui E-commerce:

Terdakwa Muh. Ridwan (terdakwa 1) membuat dan mengirim broadcast berupa gambar dan daftar harga handpone lalu terdakwa 1 mengirim kepada saksi korban Kiki melalui pesan BBM (Blackberry Massanger). Saksi korban yang merasa tertarik dengan pesan yang terdakwa 1 kirim dan tawarkan tersebut kemudian membalas BBM terdakwa 1 untuk menanyakan cara pemesanan barang berupa handpone serta cara pembayarannya. Kemudian melalui pesan BBM, terdakwa 1 menjelaskan untuk menghubungi langsung di Nomor tlp. 085368427777. Setelah itu saksi korban menelfon kenomor telpon dimaksud dan diterima oleh Anshar Suharto (terdakwa 2)

⁴² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Tehnologi Informasi (cybercrime)*, h. 15- 16

⁴³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* h.18

yang bertugas menjelaskan cara pengiriman uang untuk pembelian barang mengingat terdakwa 2 lebih fasih dan lancar berbahasa Indonesia dan terdakwa 1 tidak begitu lancar berbahasa Indonesia. Mereka terdakwa mengetahui pin BB milik saksi korban Kiki dengan cara mengirim ke nomor pin secara acak dan telah masuk dan diterima berarti nomor pin yang dikirim tersebut adalah benar dan memang aktif dan ada pemiliknya. Saksi korban Kiki melakukan pembelian handpone yang ditawarkan oleh terdakwa 2. Karena harga handpone yang ditawarkan harganya murah, garansi resmi selama 2 tahun, barangnya rusak bisa langsung diganti, kalau barang tidak tersegel bisa langsung diganti dan uang diganti 3 (tiga) kali lipat. Kerusakan pada handpone selama pemakaian sebulan dapat diganti lagi seperti handpone yang telah dibeli. Oleh karena itu saksi korban telah mentransfer uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah keseluruhan uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kerekening BNI 0219652427 an. Cindy Larisa. Setelah saksi korban mentransfer uang sampai 3 (tiga) kali kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2, ternyata saksi korban tidak dikirim barang berupa handpone oleh terdakwa.

Kasus diatas merupakan salah satu contoh penipuan e-commerce atau penipuan melalui perdagangan elektronik melalui internet atau media online.

D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Prinsip-prinsip Hukum dan Regulasi Teknologi Informasi (Cyberlaw)

a. Yurisdiksi

Prinsip utama dalam Hukum Teknologi Informasi (*Cyberlaw*) adalah prinsip Yurisdiksi, hal ini dimaksud dikarenakan tidak serta merta dapat diterapkannya Yurisdiksi Teritorial dalam kegiatan *Cyberspace* yang sering kali terjadi dalam

teritorial beberapa negara secara sekaligus. Pendekatan prinsip Yurisdiksi Ekstra-Teritorial merupakan upaya untuk dimungkinkannya penerapan hukum Teknologi Informasi (*Cyberlaw*).

Perihal Yurisdiksi dimuat dalam pasal 2 UU ITE yaitu:

“Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.

Hal ini dikarenakan mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas Teritorial atau *Universal*.

b. Asas-asas dalam *Cyberlaw*

Berdasarkan pasal 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas Kepastian Hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraan yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan luar pengadilan.
- 2) Asas Manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di upayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Asas Kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik

bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 4) Asas Iktikad Baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain.
- 5) Asas Kebebasan memilih Teknologi atau Netral Teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.⁴⁴

2. Pengertian Informasi Elektronik

Pada pasal 1 angka 1 UU ITE, menyebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *telex*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses dan simbol atau profesi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 ayat (1) dan ayat(2) UU ITE menyatakan bahwa Informasi Electronik dan/atau hasil cetakannya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di indonesia.

⁴⁴ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), h. 135.

Pengecualian mengenai Informasi Elektronik sebagai alat bukti yang sah diatur dalam pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, apabila surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang digunakan untuk proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara dan surat beserta dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Terkait dengan e-commerce, pasal 9 secara jelas mengatur bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Informasi yang lengkap dan benar maksudnya adalah informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum beserta kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara, maupun perantara dan informasi lain yang menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat dan deskripsi barang/jasa.

3. Pengertian Transaksi Elektronik

Pasal 1 angka 2 UU ITE, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup ataupun privasi. Hal ini pun harus didukung oleh itikad baik dari para pihak yang melakukan

interaksi dan/atau pertukaran selama berjalannya transaksi. Hal ini diatur secara jelas dalam pasal 17 UU ITE (O.C Kaligis, 2012: 5).

Pasal 19 UU ITE juga secara jelas mengatur bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati oleh para pihak yang membuat. Dalam hal ini, juga mencakup mengenai prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan.

Perlu diperhatikan dalam sebuah transaksi elektronik, transaksi tersebut terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Atau dengan kata lain, transaksi tersebut terjadi pada saat kesepakatan antar para pihak, hal ini dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi atau sandi (*password*). Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerima secara elektronik. (lihat pasal 20)

Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang di buat melalui sistem elektronik.

Sistem elektronik itu sendiri merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.⁴⁵

a. Sumber-sumber Hukum Elektronik

⁴⁵ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi*, h.136.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru, yakni hukum siber law, hukum telematika, hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah ini lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem informasi yang dalam pemanfaatannya baik dalam lingkup lokal maupun global dengan menggunakan teknologi informasi berbasis sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.⁴⁶

Sistem elektronik digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi sebagai penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.

Selain informasi secara teknis dan manajemen adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi kedalam bentuk organisasi dan manajemen serta keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, produser, sumber daya manusia, dan substansi.

Media elektronik yang banyak memberikan manfaat disatu sisi, pada saat kesisi lain seakan menjadi fasilitas yang memudahkan berbagai aktifitas kejahatan yang dapat mengganggu rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat. Hingga kini beberapa peraturan perundang-undangan yang sifat soft law memang dapat dijadikan alternative sebagai solusi penegakan hukum, namun banyak pihak sangat menantikan

⁴⁶ Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (*UU RI Nomor 11 Tahun 2008*) dan Dilengkapi dengan (*UU RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.V.

hadirnya peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus agar dapat menjerat berbagai tindak kejahatan dalam penipuan melalui handphone.⁴⁷



⁴⁷ Widodo, *cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h.Vii.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan langsung turun kelapangan untuk mendapatkan data yang menguatkan penelitian. Adapun lokasi penelitian adalah Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Makassar.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu :

Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian dilapangan yang dilakukan di Polrestabes Makassar dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan Putusan Pengadilan No. 1193/Pid.b/2012/PN.Mks.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
2. Observasi yaitu suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilapangan.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang monumental yang bersangkutan.

E. Metode Pengolahan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:

1. Reduksi data ialah proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
3. Pengambilan kesimpulan ialah mencari kesimpulan atas data yang di reduksi dan disajikan.

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Visi dan Misi Polrestabes Makassar

Visi dan **Misi** polrestabes Makassar adalah terwujudnya postur polri sebagai sosok penolong, pelayan, dan sahabat masyarakat serta penegak hukum yang jujur, benar, adil, transparan dan akuntabel serta beretika guna memelihara kamtibmas yang kondusif didukung sinergitas polisional dalam rangka keberlangsungan pembangunan nasional.

Pernyataan Visi:

Membangun diri menjadi sentra pelayanan masyarakat yang dipercaya dan bersahabat, penegakan hukum yang proporsional dan profesional serta menjadikan wilayah Polres Makassar sebagai Gerbang Indonesia Timur yang aman, nyaman dan tertib.

Pernyataan Misi:

- a) Membangun kemitraan dengan masyarakat di semua level dan segala bidang tugas kepolisian.
- b) Terus berupaya membangun dan meningkatkan profesionalisme melalui program pendidikan dan latihan yang teratur, bertingkat dan berlanjut secara konsisten.
- c) Mencegah dan menanggulangi semua bentuk kejahatan terutama perjudian, penyalahgunaan narkoba dan kejahatan jalanan.
- d) Meniadakan rasa takut dan khawatir bagi semua anggota masyarakat yang berada dalam wilayah hukum polrestabes Makassar.
- e) Membangun budaya bersih dalam kehidupan dan patuh hukum dalam semua aspek perilaku baik yang bersifat internal (bagi seluruh personil polrestabes Makassar beserta keluarganya) maupun eksternal (bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum polrestabes Makassar).

- f) Menjadikan polrestabes sebagai ujung tombak dalam pelayanan terhadap masyarakat.¹

Secara administrasi kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan namun untuk Negara wilayah hukum polrestabes Makassar hanya membawahi 12 polsek dari 14 Kecamatan dan 142 Kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT dengan ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C . Kota Makassar di apit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara disebelah utara kota dan sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota.

Makassar merupakan kota metropolitan dengan tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi dan budaya yang berbeda-beda timbulkan problema dan pemicu timbulnya gejolak sosial. Disamping itu, adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang membias pada reaksi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang berdampak pada stabilitas kamtibmas.

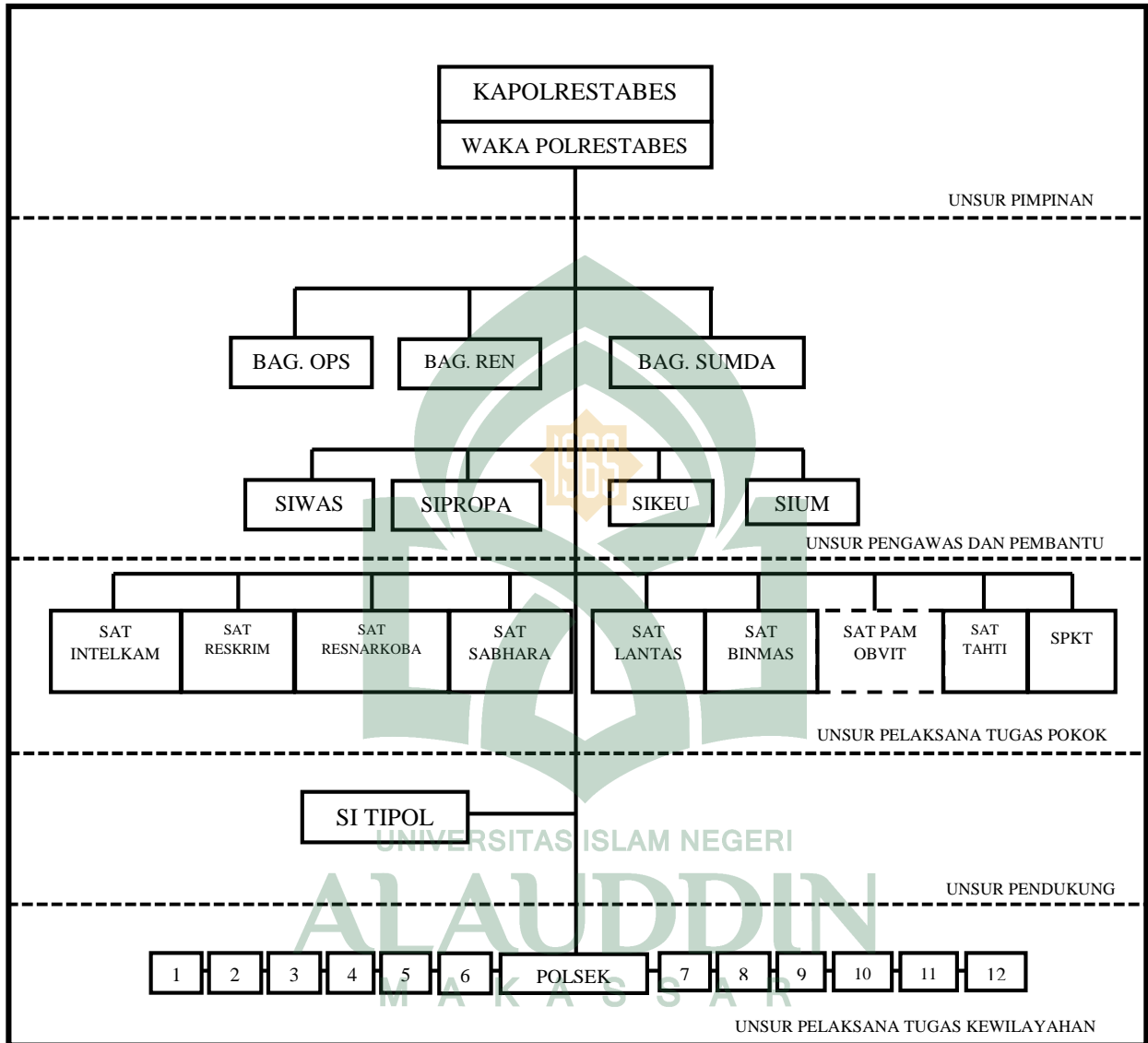
Polrestabes sebagai institusi negara yang bertugas memelihara keamanan dalam Negeri, penegakan hukum, memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat harus dapat mengantisipasi berbagai bentuk ancaman sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis terutama berkaitan dengan kebijakan pemerintah dengan agenda utama meliputi Peace, Demokrasi dan Property dalam mewujudkan Indonesia yang lebih aman, damai, adil, demokrasi dan sejahtera.

¹ Keputusan kapolrestabes Makassar, Nomor : KEP/23/1/2016,

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan membandingkan jumlah penduduk yang berdomisili 1.612.413 dan penduduk yang bekerja dikota Makassar sejumlah 1.009.396 sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 2.621.809 serta jumlah personil rill Polrestabes Makassar 2.185 orang berbanding 1: 1.200 yang artinya 1 (satu) orang polisi harus melayani, melindungi dan mengayomi sebanyak 1.200 orang penduduk, dengan harapan tetap terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif walaupun dikota Makassar memiliki tingkat kerawanan yang tinggi namun dapat di antisipasi atas kerja sama dengan pemerintah setempat, masyarakat, dan polisi.

Seiring dengan berlakunya UU No. 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), polrestabes Makassar beserta jajaran melalui humas polrestabes Makassar, telah menyiapkan fasilitas untuk membantu masyarakat yang datang secara langsung untuk mengakses informasi sesuai ketentuan dalam UU No. 14/2008 atau informasi lain bersifat Real Time, peristiwa penting maupun penjelasan dari pejabat polri polrestabes Makassar serta menyediakan fasilitas interaktif dalam rangka akurasi informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. Struktur Organisasi Polrestabes Makassar



*PERKAP No. 23 Tahun 2010

B. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Berulangnya Penipuan Melalui E-commerce Serta Kendala yang Dihadapi Oleh Pihak Polrestabes Makassar Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui E-commerce

Menurut *Mahyuddin law, Ps Kasubrik II unit III Reskrim Polrestabes Makassar*, secara umum yang harus dilakukan dari pihak kepolisian adalah tindakan preventif, preventif pertamanya itu dilakukan pada satuan binmas masyarakat, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat tidak cepat terpengaruh dengan adanya media online yang semakin luas. Kemudian memberikan tindakan-tindakan represif dilakukan oleh intelijen kepolisian dan tindakan represif dari pihak penyidik untuk penegakan hukumnya jika telah terjadi suatu kasus.²

Menurut *Mustakim, Anggota Reskrim Polrestabes Makassar* yang dilakukan untuk mencegah berulangunya penipuan melalui e-commerce dari pihak kepolisian yaitu kepolisian mempunyai fungsi binmas yaitu sosialisasi di masyarakat dan memberikan pencerahan kepada masyarakat, misalnya ketika mengiming-imingkan atau menginginkan sesuatu melalui online jangan terlalu cepat percaya, dan cari dulu kebenarannya.³

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk mencegah terjadinya kasus penipuan melalui e-commerce yaitu dengan menjalankan beberapa strategi seperti memberikan pelatihan kepada anggota kepolisian khusus dan juga edukasi kepada

² Mahyuddin Lau, Ps Kasubrik II unit III Reskrim Polrestabes Makassar, wawancara.

³ Mustakim, Reskrim Polrestabes Makassar, Wawancara.

masyarakat tentang kejahatan elektronik (Internet). Dan tindakan pencegahan kepolisian seperti patroli dan pemeriksaan terhadap dunia usaha. Kemudian memberikan efek jera kepada pelaku penipuan e-commerce.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polrestabes Makassar yaitu sebagai berikut:

1. Kendala Internal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Internal yaitu menyangkut bagian dalam (tubuh, diri, mobil, dsb); dalam (negeri).⁴ Jadi, kendala Internal adalah permasalahan yang menyangkut bagian dalam pihak Polrestabes Makassar itu sendiri. Kendala yang dihadapi adalah pada pelakunya, saksi dari kasus serta tidak adanya unit khusus menangani masalah kejahatan perdagangan elektronik yang kita kenal dengan *unit Cyber Crime*, sementara pihak penyidik terkadang sulit mengetahui keberadaan pelaku sekalipun menggunakan teknologi. Selanjutnya berdasarkan wawancara tersebut, peneliti merangkum beberapa kendala yaitu:

- a. Kurangnya saksi ahli, dalam hal ini saksi ahli gambar dan saksi ahli bahasa.
- b. Tidak adanya *unit cyber crime* di Polrestabes Makassar.
- c. Sulit memperoleh saksi kejahatan.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 439

- d. Keberadaan pelaku yang sulit dideteksi sekalipun menggunakan teknologi.

2. Kendala Eksternal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Eksternal yaitu menyangkut bagian luar (tubuh, diri, mobil, dsb); luar (negeri).⁵ Jadi, kendala Eksternal adalah permasalahan yang menyangkut bagian luar pihak Polrestabes Makassar itu sendiri. Adapun kendala yang dimaksud yaitu:

- a. Izin ketua pengadilan untuk penggeledahan dan penyitaan serta izin melalui penuntut umum dari ketua pengadilan untuk penangkapan dan penahanan.
- b. Masyarakat yang kurang memahami masalah tindak pidana *Cyber Crime* sebagai tindak pidana kejahatan.
- c. Faktor teknologi, mengenai kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini. Kemajuan teknologi mempengaruhi dalam menemukan alat bukti khususnya mengenai data elektronik dalam suatu pembuktian tindak pidana *Cyber Crime*.

C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui E-commerce dan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui E-commerce

Undang-undang ITE yang ada saat ini belum memuat pasal khusus tentang delik penipuan. Pasal 28 ayat (1) UU ITE saat ini bersifat general/umum dengan titik

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 291

berat perbuatan “ penyebaran berita bohong dan menyesatkan” serta pada kerugian yang diakibatkan perbuatan tersebut.

Delik khusus penipuan dalam UU ITE baru akan dimasukkan dalam rancangan undang-undang tentang revisi UU ITE yang saat ini dalam tahap pembahasan antar kementerian.

Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun”.⁶

Walaupun undang-undang ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”⁷

⁶ Edisi Lengkap KUHP & KUHP, (Parama publishing : Yogyakarta 2012).

⁷ Republik Indonesia Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdapat pelanggaran pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sesuai pengaturan pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Penerapan sanksi pidana penipuan melalui e-commerce yang didapatkan dengan hasil wawancara dari beberapa anggota kepolisian. *Mahyuddin Lau*, Ps Kasubrik II unit III Reskrim Polrestabes Makassar, mengatakan bahwa:

“Sanksinya Tergantung pada perundang-undangan yang ada, pasal apa yang diterapkan oleh seorang penyidik pemeriksa terhadap apa yang di adukan oleh masyarakat sehubungan dengan penipuan yang dilakukan melalui media internet”.⁸

Menurut *Mustakim*, anggota Reskrim Polrestabes Makassar bahwa sanksi pidana yaitu:

“Diatur di dalam undang-undang tentang penipuan yang terjadi melalui media elektronik jadi tergantung pada jenis tindak pidana penipuannya atau tergantung dari kasusnya”.⁹

Dan menurut *Muhammad Arwal*, BA Sat Reskrim Polrestabes Makassar, mengatakan bahwa:

“Sanksi pidana penipuan melalui media elektronik tergantung dari jenis kasusnya, apakah dikenakan pasal 378 KUHP atau UU ITE pasal 28 a, atau dikenakan pasal berlapis”.¹⁰

Berdasarkan uraian pada contoh kasus yang diterapkan pada Bab II tersebut, maka unsur “secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi

⁸ Mahyuddin Lau, Ps Kasubrik II unit III Reskrim Polrestabes Makassar, wawancara, Makassar, 06 April 2017.

⁹ Mustakim, Reskrim Polrestabes Makassar, Wawancara, Makassar, 06 April 2017.

¹⁰ Muhammad Arwal, BA Sat Reskrim Polrestabes Makassar, Wawancara, Makassar, 06 April 2017.

elektronik” dalam perkara ini terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana.

Dapat dilihat bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya masing-masing dan secara sadar melakukan kejahatan dan pantas untuk menerima hukuman.

Ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan tidak memiliki batas minimum dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 15 lima belas) hari. Dan membebani terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Jadi, sanksi pidana yang dijatukan kepada terdakwa masing-masing sesuai dengan hasil keputusan hakim.

Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada para terdakwa kurang tepat. Melihat bahwa kejahatan-kejahatan melalui perdagangan elektronik sangatlah mudah dilakukan maka perkembangan kejahatan melalui sms, internet dan media elektronik lainnya sangat pesat dan sudah sering dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa kurang memberikan efek jera. Putusan hakim sepatutnya haruslah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan dan bagi pelaku kejahatan.

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dikenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, bisa saja dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

Jumlah laporan kasus kejahatan melalui media elektronik pada kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2014 kasus yang masuk sejumlah 8 kasus, dan pada tahun 2015 kasus yang masuk sebanyak 15 kasus dan tahun 2016 jumlah kasus yang masuk sebanyak 11 kasus. Kasus yang masih dalam proses penyidikan oleh polrestabes makassar sebanyak 12 kasus, dan 22 kasus yang lainnya berhasil di selesaikan oleh polrestabes Makassar. Dari 34 kasus *cyber crime* yang masuk sebagian besar mengenai kasus penipuan melalui e-commerce, atau sekitar 29 kasus dari total kasus yang masuk.

Secara umum proses penyidikan kejahatan *cyber crime* sama dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu.

Terlihat bahwa penanganan tindak kejahatan *cyber crime* sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan. Sementara dalam menetapkan tersangka kejahatan *cyber crime*, memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibanding kejahatan konvensional, dengan melihat barang bukti berupa nomor handphone atau alamat sosial media yang dimiliki pelaku dan tentunya dengan barang bukti tersebut maka akan tertuju secara langsung kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan.

Sebagaimana kasus penipuan perdagangan elektronik yang banyak ditangani oleh pihak kepolisian. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku melalui media internet dengan menyebarkan berita bohong/tidak benar dan berita yang bersifat rahasia sehingga berakibat tipu muslihat bagi orang lain atau instansi tertentu. Perbuatan pelaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat 1 dan lebih jelas diatur dalam KUHP pasal 378 tentang perbuatan curang. Dalam proses penyidikannya harus melibatkan saksi ahli bahasa untuk mengetahui apakah konteks bahasa yang digunakan oleh pelaku adalah tindak pidana atau bukan. Namun berdasarkan hasil wawancara, pihak kepolisian Polresta Makassar tidak dapat memberikan informasi terkait proses penangkapan pelaku pada kasus *cyber crime* dalam hal ini penipuan melalui e-commerce yang berhasil diselesaikan oleh pihak

kepolisian karena bersifat rahasia. Dalam proses penyelidikan kasus ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU ITE pasal 42 yang menegaskan bahwa:

“Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Dalam KUHAP diatur pada BAB penyidikan pasal 107, dan ini sebagaimana diatur pula pada pasal 43 UU ITE, bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, juga bekerja sama dengan pejabat pegawai Negeri sipil.

Sementara dalam hal pengeledahan, pihak kepolisian harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 43 ayat 3 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE yang menerangkan bahwa:

“Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan setempat”.¹¹

Hal ini juga sebagaimana yang terdapat pada pasal 33 ayat 1 KUHAP. Proses ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan tetap memperhatikan perlindungan dengan privasi, kerahasiaan dan kelancaran layanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 43 (2) UU ITE. Dengan demikian, proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian polrestabes Makassar menggunakan payung hukum dari UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari ketentuan KUHP dan KUHAP, dan beberapa

¹¹ Republik Indonesia Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

pasal dalam UU ITE tetap mempertimbangkan ketentuan dalam KUHP karena ada hal-hal yang tidak diatur dalam UU ITE namun diatur dalam KUHP dan KUHP.

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya untuk mencegah penipuan melalui e-commerce kepolisian menjalankan beberapa strategis yaitu; memberikan pelatihan kepada anggota kepolisian khusus dan juga edukasi kepada masyarakat tentang *cyber crime*. Dan melakukan tindakan pencegahan kepolisian seperti patroli dan pemeriksaan terhadap dunia usaha. Tindakan preventif yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat tidak cepat terpengaruh dengan adanya media online yang semakin luas. Kemudian memberikan tindakan represif yang dilakukan oleh intelijen kepolisian dan tindakan represif dari pihak penyidik untuk penegakan hukumnya jika telah terjadi suatu kasus.
2. Pidana penipuan dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Penerapan sanksi pidana terhadap penipuan melalui e-commerce dapat dikenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, bisa saja dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

B. Implikasi

1. Perlu adanya undang-undang yang tegas dan jelas secara khusus mengatur tentang penipuan melalui *E-Commerce*. Perlu adanya tindak pidana yang betul-betul dapat menjerat si pelaku supaya betul-betul merasa jera sehingga ada kecenderungan tidak akan mengulangi tindak kejahatan, serta mencegah bagi mereka yang hendak melakukan tindak kejahatan ini.
2. Masyarakat perlu mengetahui segala macam jenis kejahatan terkait penipuan melalui e-commerce atau perdagangan elektronik dan cara-cara terbaru penipuan via internet agar tidak mudah tertipu dengan gaya penipuan baru via internet tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asnawi, Faulidi, Haris. *Transaksi Bisnis e-commerce perspektif islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2014
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushal Al-Qur'an, 2007.
- Gunadi, Ismu, & Efendi, Jonaedi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* Jakarta : Kencana Prenadamedia Grou, 2014.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Keputusan kapolrestabes Makassar, Nomor : KEP/23/1/2016.
- Maskun. *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2013.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2008. Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Tehnologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Partodihardjo, Soemarno. *Tanya jawab Sekitar Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Pobela, Abdul Kadir. “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik*”, Skripsi, Makassar : fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 1987.
- Syamsuddin, Rahman & Aris, Ismail. *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Wahid, Abdul & Labib, Mohammad. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2005.
- Widodo. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013.

UNDANG-UNDANG

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.

Republik Indonesia, undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI Nomor 11 Tahun 2008) dan Dilengkapi dengan (UU RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta), Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Edisi Lengkap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Yogyakarta : Parama Publishing, 2012.

INTERNET

Andreas Viklund, E-commerce: *Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman menggunakan E-commerce*, 2009, <http://jurnal-sdm.blogspot.com>. Diakses 06 Juni 2017.

Aspek-aspek Hukum Tentang Pemalsuan TandaTangan Digital Dalam E-commerce, <http://elib.unikom.ac.id>, diakses 06 Juni 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Melalui E-Commerce”** bernama lengkap Irma Suriani, Nim: 10500113005, Anak ke-empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Dahang Tabiang dan Ibu Manisi Dumbang.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Bontote’ne (MI) pada tahun 2002-2007, kemudian Penulis menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Bontote’ne (MTS) tahun 2007-2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Bontote’ne (MA) tahun 2010-2013. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui Jalur Undangan (SBMPTN) dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum hingga tahun 2017.